PENERIMAAN NEGARA BERUPA PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hilmi Delphino Arrighi, Sarah Fadillah, Dafa Fatih Trislianto, Fadhli Suko Wiryanto
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
upnvj@upnvj.ac.id

Abstrak

Inti dari permasalahan pada jurnal yang telah penulis buat yang mana berjudul penerimaan negara berupa pajak dalam perspektif Islam ialah menerangkan bagaimana dasar pajak atau dari bah sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Alquran dan juga hadis karena Islam sudah mewajibkan pembayaran zakat bagi yang sudah terpenuhi ketentuan atau kewajiban mengenai pembayaran zakat tetapi bisa saja terjadi suatu keadaan yang mana zakat tidak dapat lagi mencukupi pembiayaan negara pada saat itu maka memungut dari bahasa pajak dibolehkan tetapi tentunya dengan beberapa ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh yang ahli. Doriba atau pajak termasuk ke dalam salah satu bentuk kegiatan muamalah di bidang ekonomi yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan bersama dikarenakan tidak terdapat Nash yang secara eksplisit mengatur mengenai dari batu pajak dalam syariat Islam mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan mengenai hukum dan status pemungutan dari pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana mencari berbagai sumber lewat bacaan. Ditemukan dalam jurnal ini bahwa pajak dalam Islam ada seperti doribah jizyah kharaj humus ushr dan nawaib.

Kata Kunci: Pajak, daribah, Negara, Islam

Abstract

The essence of the problem in the journal that the author has made which is entitled state revenue in the form of taxes in an Islamic perspective is to explain how the tax basis or from bah as a source of state income in the Koran and also hadith because Islam has required the payment of zakat for those who have fulfilled the provisions or obligations regarding the payment of zakat but there could be a situation where zakat can no longer suffice for state financing at that time, collecting taxes from the language is permissible but of course with some very strict provisions and decided by experts. Doriba or tax is included in a form of muamalah activity in the economic field which functions as a fulfillment of the needs of society and the state to fund common needs because there is no Nash which explicitly regulates tax stone in Islamic law resulting in differences of opinion among regarding the law and status of collection of taxes. This study uses the library research method which seeks various sources through reading. It was found in this journal that taxes in Islam exist such as doribah jizyah kharaj humus ushr and nawaib.

Keywords :tax, daribah, state, islam

1. PENDAHULUAN

Hal yang penting untuk setiap Negara yaitu salah satunya adalah Pajak, dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Negara yang tentunya berhubungan dengan kas Negara disamping adanya pendapatan Negara dari bidang lain. Meskipun terdapat sumber pendapatan Negara dari bidang lain tidak bisa dipungkiri jikalau penopang terbesar pendapatan negara saat ini adalah pajak. Pajak tidak hanya berpengaruh kepada pendapatan Negara saja, tetapi turut andil dalam mewujudkan pembangunan Negara. Pembangunan yang dimaksud yaitu seperti biaya pendidikan, infrastuktur, biaya kesehatan, atau pun biaya subsidi lain yan mana hal tersebut berhubungan dengan pajak. Artinya, makin besar anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan, semakin besar juga kebutuhan pemerintah dalam hal penerimaan perpajakan di Indonesia. Saat masa Rasulullah saw dan para Khulafaur Rasyidin, penerimaan Negara berupa zakat yang dikenakan kepada penduduk Muslim (beragama Islam), sedangkan pajak dikenakan pada penduduk yang beragama non - muslim. Pada masa itu penduduk tidak ada yang terkena kewajiban membayar rangkap berupa zakat dan pajak.

Pada dasarnya pajak atau *dharibah* sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Al-Qur'an dan juga Hadits

tidaklah dibenarkan, dikarenakan Islam sudah mewajibkan pembayaran zakat bagi yang sudah terpenuhi ketentuan/ kewajiban mengenai pembayaran zakat. Tetapi bisa saja terjadi suatu keadaan yang mana zakat tidak dapat lagi mencukupi pembiayaan negara, pada saat itu maka memungut dharibah (pajak) dibolehkan, tetapi tentunya dengan beberapa ketentuan yang sangat tegas & diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Dharibah/pajak termasuk kedalam salah satu bentuk kegiatan muamalah di bidang ekonomi, yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan Negara untuk mendanai kebutuhan - kebutuhan bersama. Dikarenakan tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur mengenai dharibah/pajak dalam syariat Islam, mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat di antara kalangan fukaha mengenai hukum & status pemungutan dharibah (pajak).

Maslahah mursalah adalah berbagai dalil khusus berupa berbagai nash syara' yang tidak memperlihatkan diakui ataupun tidaknya suatu keabsahan, melainkan berbagai dalil umum yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai macam kemaslahatan makhluk yang mana bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam tiap - tiap hukum sebagaimana tujuannya untuk menghilangkan kemafsadatan & kemudharatan baik itu yang bersifat maknawi maupun materil, kini dan

mendatang. Saat menentukan berbagai hukum atas suatu hal yang terdapat hubungannya dengan masyarakat seperti contohnya pajak, syariat Islam mempertimbangkan berbagai macam hal salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan masyarakat umum. Dasar tersebutlah yang bisa dijadikan rujukan pemungutan dharibah/pajak seperti yang difatwakan oleh berbagai tokoh dari mazhab Maliki.

2. KAJIAN LITERATUR

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara (kemenkeu, 2007). Penerimaan negara memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin besar penerimaan negara maka semakin besar juga ekonomi negara tersebut. Negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya seperti yang tertuang dalam undang-undang dan untuk merealisasikannya pastinya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan berlangsung secara bertahap. Dalam hal ini pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Sumber penerimaan negara diperoleh dari pajak dan bukan pajak. Adapun penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang dimaksud terdiri atas pajak-pajak yang menjadi hak pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak serta bea cukai. Sedangkan sumber

penerimaan negara bukan dari pajak terdiri atas iuran produksi, iuran tetap, iuran eksplorasi, dan kompensasi data informasi. Selain itu, dalam hal pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ika, 2017).

Dalam hukum penerimaan negara bukan pajak memiliki kedudukan yang setara dengan penerimaan pajak. Dapat dilihat dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwasanya memposisikan kedua sumber penerimaan tersebut sebagai komponen pendapatan dalam negeri. Sampai detik ini, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling tinggi berkontribusi dalam APBN. Pajak telah dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk membiayai keperluan dan pembangunan pemerintah. Selain untuk menarik dana, pajak juga berfungsi mengatur melalui kebijakan insentif dan disinsentif. Mengingat pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan, pemerintah gencar berupaya menggali potensi dan memperluas cakupan pajak di masyarakat. Persoalan pajak yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat, tentunya termasuk aturan dalam hukum yang mampu melindungi pemerintah sekaligus menjamin keadilan pembebanan pada masyarakat. Disisi lain penerimaan

negara bukan pajak tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah, padahal potensi penerimaan negara bukan pajak tidak main-main. (Kurba, 2019).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang pastinya sangat penting dalam membantu menopang pembiayaan belanja suatu Negara. Pemungutan pajak pada masyarakat dilakukan oleh hampir setiap Negara yang ada di dunia ini. Besaran angka pemungutan pajak tergantung pada kebijakan pemerintah setiap Negara dalam mengelola ekonomi dan keuangan Negara tersebut. Pajak diartikan sebagai iuran wajib masyarakat pada pemerintah dimana sifatnya memaksa dan terdapat legalitasnya (berdasarkan Undang – Undang), yang artinya bahwa pemerintah memiliki kekuatan hukum seperti kurungan penjara ataupun denda untuk menindak masyarakat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak meskipun pajak ini bersifat memaksa. Pajak bisa bernilai positif maupun negative, jika bernilai positif maka pajak akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga makin mahal. Akan tetapi jika pajak bernilai negatif (subsidi), maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan riil atau bisa disebut juga

menyebabkan harga input/output menjadi lebih murah. Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan beberapa ciri pajak diantaranya:

Tidak terdapatnya kontraprestasi langsung yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dimana sebenarnya para wajib pajak menerima jasa timbal secara kolektif bersamaan dengan masyarakat lain seperti sarana kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya. Pembayaran pajak mestilah berdasarkan pada UU yang sudah dibuat oleh pemerintah (berlaku umum). Dimana UU mengenai perpajakan tersebut dibahas dan disusun bersama antara DPR dengan pemerintah sehingga bisa dipastikan kalau pajak merupakan ketentuan yang didasarkan pada kehendak rakyat, bukan hanya kehendak para penguasa semata.

Pajak yaitu iuran/kewajiban masyarakat menyerahkan sebagian pendapatan (kekayaan) kepada negara. Jika warga wajib pajak tidak melakukan kewajiban ini, maka negara bisa memaksa dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita. Pajak dipungut kepada warga (individual maupun badan usaha swasta dan negara) yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum yang pastinya berguna untuk masyarakat.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar pada

perekonomian negara. Negara akan kesulitan memenuhi keutuhannya jika tidak ada pajak. Sedikit ataupun banyaknya keperluan Negara tergantung tingkat perekonomian Negara tersebut juga tergantung pada rakyat yang ada. Semakin besar tingkat perekonomian suatu Negara maka artinya semakin besar pula kebutuhannya dan semakin besar juga pendapatan/dana yang diperlukan Negara. Istilah pajak juga ada dalam bahasa Arab, terdapat beberapa istilah salah satunya dianggap lebih mendekati istilah pajak sebenarnya yaitu *adh - dharibah*.

Pajak diperbolehkan dalam Islam alasannya karena untuk kemaslahatan ummat, yang mana pajak sekarang ini memang sudah jadi kewajiban setiap warga negara (wajib pajak) dalam suatu negara dengan alasan dana pemerintah sudah tidak bisa untuk mencukupi biaya pengeluaran – pengeluaran, dimana kalau pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan, sedangkan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mencegah kemudharatan. Karenanya, pajak tidak boleh dipungut dengan paksa dan dengan kekuasaan semata, tetapi karena memang hal tersebut merupakan kewajiban umat muslimin yang dipikul Negara (seperti memberi rasa aman, pendidikan, pengobatan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan lainnya). Terdapat beberapa alasan yang penting mengapa

pajak dijadikan sebagai instrument pendapatan Negara, diantaranya:

Kurangnya Penerimaan Zakat & Terbatasnya Penggunaan Zakat. Jika terjadi hal seperti kas zakat yang mengalami defisit, maka akan berakibat banyaknya kaum miskin yang tidak terurus, karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki Negara. Oleh sebab itu pajak bisa menjadi sesuatu hal yang penting dan *urgent*. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm kalau apabila dana dari zakat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kaum miskin di dalam suatu pemerintahan (Negara), maka hal tersebut pun menjadi tanggung jawab warga Negara tersebut yang mampu. Oleh karenanya negara wajib memobilisasi warga yang dianggap mampu untuk melalui instrumen pajak.

Ghanimah dan Fay'i berkurang bahkan tidak ada. Saat masa awal Islam, pajak merupakan sesuatu hal yang asing. Tetapi saat setelah futuhat Islam berkurang, maka fay'i dan ghanimah yang sejatinya merupakan pendapatan utama negara pun mengalami penurunan atau berkurang. Sementara negara sebenarnya masih perlu untuk membiayai kepentingan – kepentingan umum Negara. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan oleh Abu Yusuf & Ibnu Khaldun bahwa seorang penguasa boleh mengambil pajak dari warga negaranya tetapi dengan prinsip kemurahan dan keadilan, juga tidak membuat masyarakatnya terbebani

apalagi jika mengganggu kebutuhan pokok hariannya.

Menciptakan Kemashlahan Lebih Untuk Umat. Berbagai hal bentuk penunjang yang bertujuan untuk kemashlahatan ummat boleh dilakukan, salah satunya dengan memungut pajak kepada penduduk Negara tersebut. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut dimana ia menjelaskan apabila suatu pemerintahan tidak bisa lagi mendapatkan dana untuk menunjang kemashlahatan umum (seperti pembangunan sarana pendidikan, saluran air, rumah sakit, perbaikan jalan, mendirikan industri pertahanan Negara) maka pemerintah di Negara tersebut diperbolehkan untuk memungut pajak.

Seperti yang sudah diketahui bahwa di sebagian Negara yang berkembang, pajak dijadikan sumber utama penerimaan Negara yang mana diharapkan bisa menunjang dan menopang jalannya roda pemerintahan didalam hal - hal seperti pembangunan dan pembiayaan, dimana berarti jika tidak ada pajak dapat menyebabkan sebagian besar kegiatan Negara/pemerintahan sulit untuk bisa dilaksanakan. Dana hasil pemungutan pajak digunakan dengan tujuan pembiayaan dalam rangka untuk memberikan rasa aman untuk penduduk atau bagi seluruh lapisan masyarakat, supaya setiap warga Negara yang dilahirkan sampai dengan meninggal dunia bisa menikmati pelayanan dan

fasilitas dari pemerintah yang mana semua hal tersebut dibiayai dan didanai dengan uang yang berasal dari pemungutan pajak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pengalokasian dana pajak bisa sangat membantu berbagai usaha percepatan ekonomi yang telah digalakan oleh pemerintah.

Dengan semakin merata dan luasnya kesejahteraan bagi setiap pengelola usaha dan negara yang memungkinkan fasilitas pelayanan dalam rangka untuk mengerakan roda perekonomian disertai kemudahan mendirikan berbagai usaha baru yang dapat menjadikan penduduk bergairah dan memiliki motivasi untuk senantiasa berusaha meningkatkan produktivitas usaha merupakan buktinya. Selain itu manfaat dari pajak yaitu digunakan juga untuk memberikan subsidi berbagai barang yang mana sangat dibutuhkan oleh warga, lalu untuk membayar utang negara ke luar negeri, dan juga membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) baik itu dari segi pembinaan ataupun permodalan. Pajak yang diambil dari penduduk juga bisa dimanfaatkan untuk mendanai fasilitas umum seperti:

- a. Mensubsidi pangan dan BBM (Bahan Bakar Minyak)
- b. Membangun sarana & fasilitas umum seperti jembatan, jalan - jalan, sekolah, rumah sakit ataupun puskesmas.

- c. Pelestarian budaya dan juga lingkungan hidup
- d. Keamanan dan pertahanan mulai seperti senjata, bangunan, perumahan sampai berbagai gajinya.
- e. Transportasi massal, dana pemilu, dan lain-lain

Selain dimanfaatkan untuk mendanai fasilitas umum, pajak juga bermanfaat untuk:

- a. Mendanai pengeluaran produktif, contohnya untuk penyaluran bantuan bagi petani dan juga nelayan
- b. Membiayai berbagai pengeluaran Negara yang mana sifatnya memberikan keuntungan (*self liquidating*) contohnya proyek produktif barang ekspor
- c. Membiayai berbagai macam pengeluaran umum contohnya pembangunan fasilitas umum yang dapat dinikmati para penduduk
- d. Mendanai pengeluaran tidak produktif, contohnya untuk mendanai tentara untuk pembelian senjata perang.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara harfiah berarti adalah suatu cara secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan bacaan seperti buku, artikel, catatan, laporan, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak berbagai bentuk dari penerimaan negara salah satunya yaitu penerimaan dari sektor pajak. Memiliki banyak definisi menurut para ahli. Mereka mendefinisikan pajak sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran mereka serta pemahaman yang mereka miliki, seperti contoh, menurut Adriani, bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa yang diberikan oleh negara, yang terhutang pada wajib pajak yang membayarnya sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang ada, dengan tidak mendapat hasil kembali secara langsung namun dipergunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara yang sifatnya kepada fasilitas umum yang diselenggarakan pemerintah. Adalagi menurut Soepratman soemahamijaja, yaitu pajak pajak merupakan iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pernyataan dari Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tanpa imbal balik. Sehingga dapat didefinisikan secara umum bahwa pajak merupakan iuran

wajib yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak kepada pemungut pajak yaitu pemerintah atas harta yang telah dimiliki, dan pemungutan pajak tersebut berdasarkan undang-undang yang telah berlaku yang sifatnya memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Fungsi Pajak. Nyatanya pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan pemerintahan yang berlandaskan pembangunan. karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran karena sejatinya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara mempunyai fungsi untuk membiayai kebutuhan tentang pengeluaran-pengeluaran negara sehingga bisa menjalankan tugas-tugas rutin negara yang membutuhkan biaya. Biaya tersebut biasanya diambil dari penerimaan pajak. Adapun biasanya pajak untuk sekarang ini dipergunakan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan pembiayaan negara lain yang sifatnya rutin. Untuk pembelian pembangunan sendiri uang dikeluarkan dari tabungan yang pemerintah miliki yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Yang kedua pajak memiliki fungsi mengatur. Karena pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan cara melakukan kebijaksanaan besaran pajak yang harus dipungut. Karena pajak dijadikan alat untuk mencapai suatu

tujuan contohnya pajak penghasilan yang dikenakan atas penyerahan barang-barang hasil industri tertentu seperti rokok baja dan lain-lainnya. dibuatnya pajak tersebut dengan tujuan untuk menekankan produktivitas yang dampaknya bisa berdampak negatif seperti menyebabkan polusi dan mengganggu lingkungan yang ada. Yang kedua pajak yang dikenakan atas barang mewah contohnya PPNBM. Adanya pajak ini bertujuan untuk masyarakat tidak berlomba-lomba dalam memiliki barang mewah dan juga untuk mengurangi gaya hidup mewah.

Syarat Pemungutan Pajak. Secara konvensional pemungutan pajak memiliki syarat-syarat sebagai berikut yang pertama harus bersifat adil. Maksudnya adalah sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku yaitu mencapai keadilan maka undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil secara undang-undang yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata serta besarannya diselesaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil maksudnya itu pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk bisa mengajukan keberatan penundaan serta bisa mengajukan banding terhadap pembayaran pajak kepada pengadilan pajak. Yang kedua pemungutan pajak haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana pajak tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Selanjutnya pajak

tidak boleh mengganggu perekonomian maksudnya ialah ketika pemerintah memutuskan untuk memungut pajak maka tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak adanya pelemahan perekonomian yang ada di masyarakat contohnya seperti ketika ada penurunan nilai rupiah, harga dolar yang menguat, investasi yang semakin sepi serta penjualan yang semakin turun karena lemahnya daya beli masyarakat maka pemerintah tidak boleh menaikkan tarif pajak. Selanjutnya pemungutan pajak harus efisien karena sebelumnya negara harus mengatur pengeluaran-pengeluarannya dengan membuat RAPBN agar rencana pemungutan pajak bisa efisien. Dan yang terakhir sistem dari pemungutan pajak haruslah sederhana karena dengan sederhananya sistem pemungutan tersebut maka akan mempermudah serta akan mendorong masyarakat untuk melakukan kewajiban pajaknya contohnya yaitu tarif PPN yang beragam dulunya sekarang disederhanakan menjadi satu tarif saja yaitu sebesar 10% dan juga pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku untuk badan maupun perseorangan.

Pada dasarnya banyak jenis-jenis pajak dan divisi - divisi dari pajak itu sendiri. Yang pertama ada pajak menurut golongannya karena pajak sejatinya

terbagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung ialah pajak yang dibebankan terhadap kepada individu wajib pajak dan kewajibannya tidak diberikan kepada orang lain seperti contoh adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yaitu meliputi usaha gaji hadiah honor dan sebagai lainnya. Jadi pajak langsung itu kewajibannya tidak bisa dipindah tangankan. Selanjutnya di pajak langsung pajak tidak langsung ialah pajak yang dibebankan atau bisa diberikan kepada orang lain contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang transaksinya dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak tidak langsung ini bisa dikenakan kepada orang lain kewajibannya karena sifatnya bukan individu. Selanjutnya adalah jenis pajak menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak subjektif ialah pajak yang kewajibannya berdasar pada subjeknya yang mana besaran pajak ini memperhatikan keadaan wajib pajak contohnya Pajak penghasilan.

Pajak penghasilan akan melihat dulu seberapa besar penghasilan yang

didapat oleh wajib pajak lalu nanti akan dihitung berapa besaran yang sesuai dan adil. Yang kedua ada pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan kesadaran wajib pajak. Ya itu contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Seperti contoh orang yang membeli burger di KFC seharga Rp . 10.000,- dan dikenai PPN sebesar 10% maka harga burger tersebut menjadi Rp. 11.000,-. Pajak ini tidak memandang wajib pajaknya karena selama wajib pajak bisa membeli maka dikategorikan dapat membayar pajak tersebut. Selanjutnya ada jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama ada pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan biasanya dipergunakan untuk kepentingan negara contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan, PPn, PPNBM dan lainnya. Adapun pajak ini ketika dipungut maka darinya akan masuk ke kas negara. Selanjutnya ada pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan daerahnya. Dari pajak daerah ini terbagi menjadi dua sumber yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Adapun pajak provinsi seperti contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sementara pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel pajak restoran serta pajak hiburan.

Pada awalnya Islam tidak mengenal istilah pajak karena di dalam Al-Qur'an dan Hadis

hanya ada Zakat yang diwajibkan serta infak dan sedekah yang di sunahkan. Pajak bisa juga kita sebutkan sebagai iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Pajak bisa dilakukan pada zaman Rasul dikarenakan uang yang ada di baitul mal sedikit atau sudah habis.

Pajak dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah di bidang ekonomi dimana fungsinya sebagai pemenuhan negara yang dilakukan atau dibiayai oleh masyarakat secara kolektif (Surahman & Ilahi, 2017). Dalam Islam sendiri lebih tepatnya pada zaman Rasulullah SAW melakukan inovasi dalam praktik muamalah, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zubair bin al-Awwam, beliau tidak suka menerima titipan harta, melainkan beliau lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman (Huda & Si, 2020). Tidak ada nash yang mengatur secara eksplisit di dalam syariat Islam, karena itu banyak sekali perbedaan pendapat yang dikeluarkan ulama dalam hukum memungut pajak.

Pihak yang pro terhadap pajak seperti Abu Yusuf, Ibn Khaldun, dan juga Umer Chapra mengatakan bahwa pajak diperbolehkan selama harus dikumpulkan secara adil, tidak diperbolehkan jika melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan dipergunakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hak negara muslim juga jika meningkatkan pemasukan dari sumber pajak di samping zakat (Miming Lestari, 2015). Hal ini disebabkan karena dana

zakat dipergunakan untuk sepenuhnya kaum miskin. Padahal disisi lain negara juga butuh pemasukan dari sumber lain yaitu pajak agar dapat membangun negara dan melakukan fungsi seperti alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara maksimal. Pajak saat ini yang bersifat progresif sangat sesuai sekali dalam pandangan Islam karena pajak akan dikenakan sesuai dengan ukuran, yang artinya jika nominal kena pajak kecil pajaknya akan kecil juga dan sebaliknya jika pajaknya besar berarti nominal kena pajaknya juga besar.

Sedangkan pihak yang kontra terhadap pajak seperti Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan bahwa pajak tidak diperbolehkan karena ada unsur pemaksaan dan takut disalahgunakan seperti korupsi serta menjadi suatu alat penindasan. Berbeda dengan pembayaran zakat yang tidak menerima kontra prestasi sebagaimana pembayaran pajak. Masalah lain yang saat ini menjadi keberatan adalah mereka harus melakukan kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak (Turmudi, 2015).

Mengenai sumber penerimaan negara dalam bentuk pajak pada masa Islam dapat ditunjukkan dan bervariasi bentuknya. Semua sumber tersebut pada zaman itu telah dilaksanakan secara baik dan terorganisir. Lantas bagaimana bentuknya? Berikut penjelasannya:

- a. Dharibah merupakan sejenis pajak yang diambil dari kaum muslim yang kaya bersifat temporer

biasanya pada saat baitul mal kehabisan dana dan dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan lagi (Sugiyono, 2016). Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan dharibah hanya dipungut dalam keadaan yang kondisional, penguasa boleh mengambil dharibah jika uang di baitul mal sedikit bahkan habis, dan setelah terisi kembali maka dharibah akan dihentikan. Selain itu, dharibah diambil bagi umat muslim yang kaya saja dan digunakan untuk kepentingan umat muslim saja. Atas dasar ini dharibah jelas berbeda dengan pajak pada masa modern.

- b. Kharaj Sumber penerimaan yang pertama kali dikenalkan Rasulullah SAW adalah kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah, atau biasa di Indonesia kita menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun begitu ada perbedaan yang mendasar antara sistem kharaj dan sistem PBB, perbedaannya adalah untuk kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah sedangkan untuk PBB berdasarkan zoning. Selain itu, kharaj ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim. Jumlah besar pembayaran kharaj ditentukan oleh pemerintah (Adiwarman Azwar Karim, 2007, p. 257) Secara

spesifik besarnya pembayaran kharaj ditentukan oleh tiga hal yaitu:

- 1) Jenis tanaman;
- 2) Jenis irigasi;
- 3) Karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah.

Khumus merupakan pajak proporsional dalam Islam sebesar 20% (Ibnudin, 2019). Dalam QS Al-Anfal: 41 telah dijelaskan bahwa khums itu ada dan tidak terbantahkan. Diayat tersebut terdapat kalimat "ghanintum min sya'in", yang artinya dari apa saja yang kamu peroleh. Hal ini akhirnya diperdebatkan oleh para ulama terkait objek yang dimaksud di ayat ini. Para ulama syiah berpendapat bahwa sumber pendapatannya itu apa pun dan dikenakan khums sebesar 20%. Sedangkan ulama sunni berpendapat objek yang dikenakan khums pada ayat tersebut adalah harta rampasan perang (ghanimah) saja.

- a. Jizyah merupakan pajak yang dipungut kepada orang non muslim untuk jaminan perlindungan dan pengganti layanan sosial serta ekonomi. Jizyah ini diambil untuk kaum non muslim selama mereka tetap kepada kepercayaannya. Namun jika seandainya mereka menjadi muslim pungutan jizyah akan dihapuskan. Hukum Jizyah tidak wajib jika orang kafir yang

bersangkutan tidak mampu untuk membayar jizyah (Aisyah & Asmarita, 2021).

- b. Ushr adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara atau mirip seperti be cukai. Jumlah pungutan Ushr telah ditentukan oleh Umar Bin Khatab RA, Umar menentukan jumlah pungutan kepada kaum muslim sebesar 2.5%, kaum Zimmi 5%, dan kafir Harbi sebesar 10%. dipungut atas seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. Ushr tidak di ambil dari selain barang dagangan. Ushr tidak di ambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya, atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan (Hidayati, 2018).
- c. Nawaib/Daraib Merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat. Hal ini terjadi dalam masa perang Tabuk (Aisyah & Asmarita, 2021)

5. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU sehingga pajak bersifat memaksa, sementara istilah lain pajak dalam bahasa Arab yaitu adh - dharibah. Menurut golongannya, pajak konvensional dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung (pajak pendapatan) dan pajak tidak langsung (Ppn). Sementara dalam Islam, sumber pajak terbagi menjadi 6 (dharibah, jizyah, kharaj, khums, Ushr, Nawaib). Seperti yang sudah diketahui bahwa di sebagian Negara yang berkembang, pajak dijadikan sumber utama penerimaan Negara dan diharapkan bisa menunjang, menopang jalannya roda pemerintahan dalam hal - hal seperti pembangunan dan pembiayaan, berarti jika tidak ada pajak dapat menyebabkan sebagian besar kegiatan pemerintahan sulit untuk bisa dilaksanakan.

Saran

Sarannya adalah yang pertama untuk yang membaca jurnal ini maka bisa dijadikan referensi sebagai bahan bacaan atau tambahan informasi mengenai pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam Islam yang mana pajak ternyata ada dalam pemasukan negara perspektif Islam. Yang kedua jurnal ini juga bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik hal serupa agar nantinya penelitian selanjutnya bisa dilakukan

lebih detail dan lebih komprehensif dari jurnal Yang ada sekarang.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S., & Asmarita, E. (2021). KONSEP KEUANGAN PUBLIK DALAM ISLAM Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid, 9(1), 69-92.

Fahadil Amin Al Hasan, R. Q. (2017). INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017), 11(2), 165-190.

Hidayati, N. (2018). 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam, 1(1), 73.

Ika, S. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral : Policy Reform untuk Meningkatkan Penerimaan Negara, 1(1), 42-67.

Karim, A. A. (2007). Ekonomi Makro Islami, 342.

KHALID, S. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah).

Kuba, M. I. (2019). Pajak dan Bukan Pajak Serupa Tapi Tak Sama.

Maman Surahman, F. I. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM, 1(2), 166-177.

Sugiyono, P. D. (2016). Pajak dalam Islam, 53(9), 1689-1699.

Turmudi, M. (2015). PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat), 8(1), 128-142.